

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Khoiruddin Muchtar, “Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai”. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang upaya- upaya Partai Golkar dalam membentuk citra sebagai partai baru yang dinamis dan modern serta bagaimana strategi Golkar memperkenalkan diri sebagai partai kosmopolit. Penelitian ini juga ingin memperoleh gambaran, bagaimana Golkar mempertahankan eksistensi dan Citra Partai, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pembahasan tentang Pencitraan partai politik ini mengambil contoh dari Partai Golkar yang berupaya mendongkrak citra partai dengan beberapa langkah diantaranya, dengan mengajukan motto “*The Party of Idea*” yaitu; sebuah gagasan yang ingin mencitrakan Golkar sebagai partai yang berkembang diwarnai dengan pertarungan berbagai gagasan atau ide yang ditelorkan oleh kader-kader Golkar. Kedua, untuk mencitrakan sebagai partai kosmopolit dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri menemui para pimpinan partai dan pimpinan negara. Ketiga, melakukan pidato politik dengan mensosialisasikan pemikiran dan ide-ide kontemporer yang dimiliki Golkar lewat orasi yang disampaikan oleh ketua umum.⁶

2. Yusa Djuyandi, “Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto Dalam Pemilihan Ketua Dpd Ii Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016–2021.” Penelitian ini adalah kajian dari fenomena Terpilihnya Hendra Hemeto yang mampu mengalahkan Warsito Somawiyono sebagai kandidat terkuat, karena sebelumnya didukung oleh Pimpinan Kecamatan (PK) sebagai pemilik suara, menjadi

⁶ Khoiruddin Muchtar, “Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai”, *Jurnal UIN SG Bandung*, 14(2), h. 138.

menarik dikaji dari perpektif komunikasi politik. Kemenangan Hendra Hemeto menarik untuk dikaji terutama berkaitan dengan bagaimana pola komunikasi politik diri dan tim kampanyenya dalam Musda Partai Golkar. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka data penelitian dikaji secara kualitatif deskriptif, yaitu mengkonstruksikan realitas dan makna kultural serta fokus pada proses dan peristiwa secara interaktif. Dari hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan Hendra Hemeto tidak lepas dari pengelolaan komunikasi politik yang baik terutama oleh tim kampanye dirinya.⁷

3. Hasan Basri, "Strategi Komunikasi Politik Dpd Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019." Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Golkar dalam memenangkan Pemilu 2019 adalah agar Golkar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Strategi komunikasi politik yang diterapkan Golkar partai dalam pemilu legislatif merupakan komunikasi terstruktur dari pimpinan pusat kepada kader di pedesaan agar pesan-pesan politik dapat tersampaikan secara merata, dalam hal ini menghadapi Pemilu Legislatif 2019, Golkar memberikan informasi kepada masyarakat yang berhak memilih, mendidik masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga politik lainnya, pengurus DPD Golkar untuk menyampaikan segala bentuk program kerja kepada masyarakat, sebagai sarana komunikasi politik partai seperti memberikan informasi kepada media massa. Masyarakat yang tidak menerima pesan dan tidak mau berkomunikasi dengan Golkar kader partai karena tidak tertarik dengan kegiatan politik, orang yang tertarik lebih tertarik pada manipulasi politik, dan orang-orang yang sudah memiliki kandidat dari kerabat dekat.⁸

⁷ Yusa Djuyandi, "Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto Dalam Pemilihan Ketua Dpd Ii Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016–2021", *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), h. 10-21.

⁸ Hasan Basri, "Strategi Komunikasi Politik Dpd Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), Juni 2021.

4. Teguh Adi Prasajo. “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk Dprd Jateng Periode 2014-2019.” Penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan wawancara yang kami lakukan terhadap salah satu anggota seleksi tim dan beberapa calon legislatif yang telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Dengan metode penelitian ini ada beberapa informasi yang kami peroleh dari penelitian yang kami lakukan yaitu khususnya DPD Golkar Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah memberikan peluang lebih bagi Caon internal partai dibandingkan calon dari luar partai. Dari penelitian yang kami lakukan kami juga mengetahuinya bahwa mekanisme rekrutmen oleh DPP Partai Golkar sebatas Dewan Kabupaten/Kota telah terangkum dalam keputusan DPP. Berdasarkan hasil penelitian itupun kita bisa akhirnya menyimpulkan bahwa pola rekrutmen calon dilakukan oleh DPD Golkar Jawa Tengah provinsi terbuka.⁹

5. Arief Zaafri Razaqtiar, “Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013.” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Penentuan informan dilakukan secara purposive (menguasai fenomena yang ada). Data diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori strategi politik, yang akan menjelaskan tentang bagaimana strategi partai sebagai organisasi politik mempunyai peran untuk merebut atau mendapatkan kekuasaan dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran partai politik dalam menentukan kader terbaiknya untuk menduduki posisi pengambil kebijakan (*policy maker*) adalah hal yang wajib dilakukan guna

⁹ Teguh Adi Prasajo. “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019.” *Jurnal Politika*, 4(2) Oktober 2013.

memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Partai berkewajiban untuk mencetak kader terbaiknya yang akan menduduki jabatan elit pengambil kebijakan. Kader yang militan, akan mempunyai daya tarik untuk bergabungnya koalisi partai lain. Hal ini yang harus dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah. Kader-kader terbaik ini kemudian akan memberikan dampak positif, seperti misal akan meyakinkan bergabungnya koalisi partai lain yang mempercayakan dukungannya dan juga menambah keyakinan anggota partai lain dalam mendukung kemenangan calon pasangan tersebut. UU pilkada langsung sebagai pembuktian bahwa lahirnya sosok figur atau tokoh yang dipilih oleh masyarakat menjadi hal yang sangat penting saat ini. Orientasi masyarakat sekarang adalah memilih figur atau pasangan calon dalam pilkada bukan memilih partai politik semata.¹⁰

6. Jamaludin Ghafur dan M. Yasin al Arif, “Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik: (Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan).” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui persyaratan dan mekanisme pemilihan calon Ketua Partai Golkar dan PPP, sekaligus mengevaluasi mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golkar dan PPP agar dapat memberikan kelancaran dalam proses suksesi kepemimpinan guna menghindari terjadinya dualisme kepengurusan. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan? (2) Apakah mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan tersebut sudah memberikan kepastian hukum guna menghindari terjadinya dualisme kepengurusan? Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas

¹⁰ Arief Zaafril Razaqtiar, “Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013.” *Jurnal Politik Muda*, 5(3), Desember 2016.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Partai Golkar maupun PPP telah mengatur secara rinci persyaratan dan mekanisme suksesi kepemimpinan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Sehingga dari aspek legal-formal, AD/ART partai telah cukup memadai untuk dijadikan sebagai aturan main (rule of the game) dalam suksesi kepemimpinan. Namun demikian, perilaku sebagian elit partai yang tidak mau mematuhi aturan main tersebut telah menyebabkan lahirnya konflik. Sehingga dualisme kepengurusan partai pun tidak dapat dihindarkan.¹¹

Dari beberapa penelitian yang telah ada di atas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada yakni, lokasi penelitian dan subjek penelitian.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pemilih Milenial

Istilah milenial pertama kali muncul pada tahun 1991, tetapi belakangan ini istilah milenial dipakai sebagai kata yang merepresentasikan generasi yang lahir pada awal tahun 1980an hingga akhir 1990an¹¹. Penggolongan umur milenial atau generasi Y sebenarnya belum begitu spesifik karena banyaknya persamaan yang dimiliki generasi Y dan generasi Z sehingga kedua generasi ini biasanya saling dikaitkan dan berhubungan karena hidup beriringan dengan munculnya teknologi baru. Selain itu, karakteristik kedua generasi ini tidak jauh beda. Munculnya istilah milenial karena generasi ini dimulai pada awal munculnya teknologi mulai dari games, gadget, smartphone, internet dan istilah tersebut semakin tidak asing terdengar hingga sekarang. Menurut Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi, tiga karakteristik utama dari

¹¹ Jamaludin Ghafur dan M. Yasin al Arif, "Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik: (Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4). Oktober 2007.

millennial yaitu kreatif (*creative*), terhubung (*connected*), dan percaya diri (*confidence*).¹²

Milenial dilihat sebagai obyek yang cukup mumpuni untuk membentuk suatu komoditas yang nantinya akan mengumpulkan banyak massa atau perkumpulan yang tentunya memiliki banyak suara. Hal ini biasa dimanfaatkan oleh para aktor-aktor politik untuk menarik suara milenial dan bergabung untuk meraup suara dalam kalangan tersebut. Namun, tidak jarang juga milenial mendapat stigma negatif karena hadirnya teknologi dalam segi kehidupan milenial sehingga dianggap sebagai generasi yang antisosial, malas dan bahkan dianggap buta terhadap politik. Belakangan ini, dalam pesta demokrasi stigma tersebut berbanding terbalik dengan fakta lapangan yang mencatatkan bahwa jumlah pemilih milenial sebesar 70 hingga 80 juta pemilih dari jumlah DPT sebesar 192.828.520 pemilih. Pemilih milenial yang memilih untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi seperti halnya pemilu memberikan gambaran bahwa milenial lebih bersemangat untuk berpartisipasi. Golongan milenial diperkirakan memiliki suara sekitar 40 persen pemilih pada 2019, menurut laporan dari Alvara Research Center. Presentase tersebut tentu bukan hal kecil sehingga parpol akan mendulang suara apabila mendapatkan suara milenial.¹³

Dalam hal ini, konsep pemilih milenial digunakan untuk melihat fenomena yang ada terkait presentase milenial berpartisipasi dalam Pileg 2019. Dengan presentase yang tinggi tersebut perlu dilihat indikator ketertarikan milenial pada suatu partai politik khususnya pada Partai Nasdem yang berhasil mendulang suara tertinggi di Makassar. Hal ini tentu tidak terlepas dari suara pemilih khususnya dilihat dari suara pemilih milenial. Selain itu, Partai Nasdem juga menghadirkan beberapa caleg milenial yang berhasil duduk sebagai anggota legislatif.

¹² Hasanuddin Ali & Purwandi, Lilik. 2017. Millennial Nusantara, Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya. Jakarta: Kompas Gramedia

¹³ Prasetya, Galih. 2019. Demokrasi Milenial. Jogjakarta: Ruas Media

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik adalah suatu kelompok yang menghimpun sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki ideologi serta tujuan yang sama. Tujuan utama dari partai politik ialah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara.¹⁴

Partai politik juga dibentuk secara konstitusional sehingga dalam mencapai tujuannya, partai politik juga menggunakan cara-cara yang bersifat konstitusional. Selain itu, tujuan lain dari partai politik ialah untuk mendapatkan, dan mempertahankan kekuasaan demi menjalankan atau mewujudkan ideologi mereka, dalam bentuk program-program yang akan disusun. Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Sehingga melalui partai politik ialah rakyat berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

2.2.2 Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

¹⁴ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.¹⁵

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.¹⁶

2. Fungsi Partai Politik

Sebagai negara demokrasi, terdapat beberapa fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang - Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.

¹⁵ Ali Safa'at Muchamad, 2011, *PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Rajawali pers. Hal 4-5

¹⁶ Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada. h. 472.

- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Peran Partai Politik

Adapun peran dari partai politik menurut Miriam Budiardjo, setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang hitrogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinannya berpotensi konflik.

Dalam hal ini, konsep partai politik dalam penelitian ini digunakan untuk melihat fungsi dan peran partai politik khususnya yang dijalankan. Pendidikan politik hingga rekrutmen sebagai fungsi partai politik tentu perlu diimplementasikan dengan baik untuk menghasilkan kader yang memiliki kredibilitas baik. Selain itu, tentu tidak terlepas dari peran partai politik yang dijalankan seperti halnya komunikasi politik hingga sosialisasi politik yang menghasilkan citra baik kepada calon pemilih.

2.2.3 Budaya Politik

Budaya politik merupakan budaya atas dasar norma yang mengatur sikap, dan pola pemikiran psikologis terhadap masyarakat dalam

kehidupan.¹⁷ Budaya partisipasi terfokus kepada orientasi politik. Orientasi politik membahas mengenai pengetahuan, kepercayaan, dan pemahaman seseorang mengenai sistem politik”.¹⁸

Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik, demikian individu-individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang senantiasa memiliki orientasi terhadap sistem politiknya. Hal itu terjadi dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern, bahkan masyarakat primitif sekalipun. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik. Pengertian budaya politik seperti itu menggerakkan pemahaman pada perpaduan antara dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu.¹⁹

Budaya politik sebagai unsur dari kebudayaan merupakan sesuatu yang inheren pada setiap masyarakat dalam sistem politik tradisional maupun modern. Dalam hal ini Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, dan juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya Almond dan Verba melihat bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga orientasi, yakni pertama, orientasi kognitif yaitu orientasi yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya. Kedua, orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan segala penampilannya. Ketiga, orientasi evaluatif yaitu keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.²⁰

¹⁷ Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, hal.10.

¹⁸ Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, hal.17.

¹⁹ Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang: Semarang Press.

²⁰ Herimanto. (2010). *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.

Contoh tentang saling berhubungannya ketiga orientasi tersebut. Untuk dapat membentuk suatu penilaian tentang seorang pemimpin, seorang warga negara dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pemimpin tersebut secara memadai. Namun demikian, tentulah bahwa pengetahuan tersebut telah dipengaruhi oleh berbagai aspek dan yang paling dominan ialah perasaannya sendiri. Demikian pula sebaliknya bahwa pengetahuan seseorang tentu juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang simbol politik yang sedang berlangsung. Bahkan dikatakan bahwa pengetahuan tentang simbol saling mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.²¹

Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang didalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai. Dengan kondisi dapat dikatakan bahwa dalam kerangka pengembangan budaya politik suatu bangsa, diperlukan keterjalinan dan keterkaitan antar nilai budaya maupun antar komponen orientasi dalam masyarakat sehingga dapat terjalin proses interaksi ke arah pengembangan budaya. Budaya politik merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik. Hal ini dikarenakan bekerjanya struktur dan fungsi politik sangat ditentukan oleh budaya politik yang melingkupinya. Dalam konteks sistem politik Indonesia, memosisikan budaya politik sebagai satu dari sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem politik, bahkan yang dianggap paling intens dan mendasari sistem politik. Lebih jauh, mengkonstatasi bahwa salah satu parameter pembangunan politik indonesia adalah tercapainya keseimbangan atau harmoni budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada atau akan ada.²²

²¹ Syamsudin, Nazarudin. 2009. Pengantar Ilmu Politik . Jakarta. Rajawali Pers.

²² Herimanto. (2010). Ilmu Sosial & Budaya Dasar. Jakarta : PT.Bumi Aksara.

Berpijak dari paparan diatas, secara eksplisit menerangkan bahwa budaya politik sesungguhnya akan dapat menjelaskan perilaku politik dan partisipasi politik, dengan kata lain pendekatan budaya politik adalah upaya menembus cara lebih dalam pemahaman tentang perilaku politik dan partisipasi politik. Selain itu, pendekatan budaya politik untuk mengenal atribut atau ciri yang terpokok untuk menguji proses yang berlanjut maupun yang berubah, seiring dengan proses perubahan dan perkembangan politik masyarakat di masa konsolidasi demokrasi saat ini. Untuk melihat peranan individu-individu dalam subjek politik itu, Almond dan Verba membedakan golongan subjek. Subjek pertama adalah peranan struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrasi. Kedua penunjang jabatan seperti pemimpin monarkhi, legislator, dan administrator. Struktur dan penunjang jabatan serta struktur secara timbal balik dapat diklasifikasi apakah mereka termasuk dalam proses “masuk” politik atau dalam proses administratif atau “keluaran”. Dengan proses (input) politik dapat terjadi bahwa arus tuntutan politik masyarakat mengalami pemutusan dengan proses konversi tuntutan-tuntutan ini ke arah kebijakan dan otoritatif.²³

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi dan kecakapan politik yang dimiliki. Orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintah negaranya dapat digolongkan ke dalam kebudayaan politiknya. Suatu model budaya politik tertentu tak dapat dihubungkan secara kaku dengan sistem politik, apalagi hal itu menyangkut budaya politik yang lingkupnya luas, terutama bila subkultur juga disertakan. Almond dan verba mengklasifikasikan tipe-tipe budaya politik:

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan

²³ Herimanto. (2010). Ilmu Sosial & Budaya Dasar. Jakarta : PT.Bumi Aksara.

yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan perannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan. Collemen mencontohkan masyarakat suku-suku di Afrika, yang tidak terdapat pembagian pesan secara khusus antara pesan politik, sosial ataupun religius. Orientasi parokial menyatakan ketiadaannya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politik lainnya. Dengan kata lain bahwa masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik termasuk bagian-bagian terhadap perubahan sekalipun. Dengan demikian parokialisme dalam sistem politik yang diterensiasi lebih bersifat afektif dan orientatif daripada kognitif.²⁴

2. Budaya Politik Subjek

Tipe budaya politik subjek ini memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya, yang perhatian dan frekuensi orientasi terhadap aspek masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal itu berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya subjek menyadari telah adanya otoritas pemerintah. Orientasi pemerintah yang nyata terlihat dari kebanggaan ungkapan saling, baik mendukung atau bermusuhan terhadap sistem. Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Di yakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima keputusan yang diambil dan segala kebijaksanaan pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan mereka memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan pejabat bersifat mutlak. Tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi perintahnya, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijaksanaan pemimpinnya. Orientasi budaya subjek yang murni sering terwujud dalam masyarakat

²⁴ Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang. IKIP Semarang Press

yang tidak terdapat struktur masukan yang dideferensiasi. Demikian pula dalam budaya subjek orientasi dalam sistem politik lebih normatif dan efektif daripada kognitif, oleh karena itu, dapat dipahami bila mereka memiliki sikap yang demikian.²⁵

3. Budaya Politik Partisipan

Masyarakat dengan budaya partisipan, memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahwa terhadap struktur, proses politik dan administratif, tegasnya terhadap input maupun output dari sistem politik itu. Dalam budaya itu seseorang atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya. Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Hal itu karena masyarakat telah sadar bahwa begitu kecilnya mereka dalam sistem politik, meskipun tetap memiliki kesadaran sebagai totalitas, masukan, keluaran dalam konstelasi sistem politik yang ada. Anggota-anggota masyarakat partisipatif diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat, meskipun sebenarnya dimungkinkan mereka menolak ataupun menerima.²⁶

²⁵ Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang. IKIP Semarang Press

²⁶ Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang. IKIP Semarang Press.